BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2012 indikator kesejahteraan Indonesia dipastikan naik secara signifikan. Hal ini berdasarkan hasil survey dari Gallup, lembaga riset terkemuka di AS yang telah beroperasi selama 75 tahun dengan fokus penelitian melalui survey pada tingkat global. Gallup menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan. Sebagai contoh masyarakat yang merasa berkembang di Indonesia meningkat dari 12% pada tahun 2006 menjadi 20% di tahun 2012. Tingkat perasaan positif (*positive experience index*) Indonesia mencapai 79,9% pada tahun 2013 atau peringkat 12 dari 1422 negara yang disurvey. Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat kebahagiaan dan perasaan terhormat masyarakat.

Namun demikian, terdapat tantangan untuk dilakukan perbaikan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi sangat tinggi dimana 88% masyarakat yang di survey oleh Gallup menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara meluas di Pemerintah (Sekretariat Kabinet RI, 2013). Tingkat persepsi di Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Ini mencerminkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia di Indonesia masih sangat minim. Kurangnya kesadaran bagi setiap individu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harusnya tidak hanya

ditekankan kepada masyarakat akan tetapi kepada para pemegang jabatan di pemerintahan juga.

Salah satu contoh tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tambunan (2003:167) menjelaskan definisi IPM atau yang dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standar kehidupan. Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya.

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut. Setiap tahunnya daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Berikut adalah tabel IPM di Indonesia pada tahun 2005-2011:

Tabel 1.1. Tabel Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) Tahun 2005 – 2011

Propinsi/ Kabupaten/Kota	IPM						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1. Nanggroe Aceh D	68,7	69	69,4	70,76	71,31	71,7	72,16
2. Sumatera Utara	71,4	72	72,5	73,29	73,8	74,19	74,65
3. Sumatera Barat	70,5	71,2	71,6	72,96	73,44	73,78	74,28
4. Riau	72,2	73,6	73,8	75,09	75,6	76,07	76,53
5. Jambi	70,1	71	71,3	71,99	72,45	72,74	73,3
6. Sumatera Selatan	69,6	70,2	71,1	72,05	72,61	72,95	73,42
7. Bengkulu	69,9	71,1	71,3	72,14	72,55	72,92	73,4
8. Lampung	68,4	68,8	69,4	70,3	70,93	71,42	71,94
9. Bangka Belitung	69,6	70,7	71,2	72,19	72,55	72,86	73,37
10. Kepulauan Riau	70,8	72,2	72,8	74,18	74,54	75,07	75,78
11. DKI Jakarta	75,8	76,1	76,3	77,03	77,36	77,6	77,97
12. Jawa Barat	69,1	69,9	70,3	71,12	71,64	72,19	72,73
13. Jawa Tengah	68,9	69,8	70,3	71,6	72,1	72,49	72,94
14. Yogyakarta	72,9	73,5	73,7	74,88	75,23	75,77	76,32
15. Jawa Timur	62,22	68,4	69,2	70,38	71,06	71,62	72,18
16. Banten	61,92	68,8	69,1	69,7	70,06	70,48	70,95
17. Bali	69,1	69,8	70,1	70,98	71,52	72,17	72,84
18. Nusa Tenggara Barat	60,6	62,4	63	64,12	64,66	65,2	66,23
19. Nusa Tenggara Timur	62,7	63,6	64,8	66,15	66,6	67,26	67,75
20. Kalimantan Barat	65,4	66,2	67,1	68,17	68,79	69,15	69,66
21. Kalimantan Tengah	71,7	73,2	73,4	73,88	74,36	74,64	75,06
22. Kalimantan Selatan	66,7	67,4	67,7	68,72	69,3	69,92	70,44
23. Kalimantan Timur	72,2	72,9	73,3	74,52	75,11	75,56	76,22
24. Sulawesi Utara	73,4	74,2	74,4	75,16	75,68	76,09	76,54
25. Sulawesi Tengah	67,3	68,5	68,8	70,09	70,7	71,14	71,62
26. Sulawesi Selatan	67,8	68,1	68,8	70,22	70,94	71,62	72,14
27. Sulawesi Tenggara	66,7	67,5	67,8	69	69,52	70	70,55
28. Gorontalo	65,4	67,5	68	69,29	69,79	70,28	70,82
29. Sulawesi Barat	64,4	65,7	67,1	68,55	69,18	69,64	70,11
30. Maluku	69	69,2	69,7	70,38	70,96	71,42	71,87
31. Maluku Utara	66,4	67	67,5	68,18	68,63	69,03	69,47
32. Papua Barat	63,7	64,8	66,1	67,95	68,58	69,15	69,65
33. Papua	60,9	62,1	62,8	64	64,53	64,94	65,36
Indonesia	**68,7**	**69,6**	**70,1**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**

Sumber Data :
Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2012,
Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. IPM di berbagai daerah di Indonesia juga cenderung membaik seiring dengan adanya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) periode 2010-2014. Demikian hasil evaluasi awal yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), Pemerintah Indonesia, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) (Malau, 2013). Diharapkan dengan adanya kenaikan pada IPM diatas, dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor industri. Tidak dapat hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi negara tetapi juga harus lebih mengandalkan Sumber Daya Manusia yang kreatif karena kreativitas manusia itu berasal dari daya pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa juga tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi juga harus mampu bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas yang popular dengan sebutan Industri Kreatif atau Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor Industri yang bersangkutan di bidangnya. Industri kreatif sendiri merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Pergeseran dari Era Pertanian ke Era Industrialisasi, disusul dengan Era Informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi maupun globalisasi ekonomi, telah membawa peradaban baru bagi manusia.

Walaupun tidak menghasilkan produk dalam jumlah banyak, industri kreatif mampu memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Departemen Perdagangan (2008) mencatat bahwa kontribusi industri kreatif terhadap PDB di tahun 2002 hingga 2006 rata-rata mencapai 6,3% atau setara dengan 152,5 trilyun jika dirupiahkan. Industri kreatif juga sanggup menyerap tenaga kerja hingga 5,4 juta dengan tingkat partisipasi 5,8%. Dari segi ekspor, industri kreatif telah membukukan total ekspor 10,6% antara tahun 2002 hingga 2006. Pada tahun 2012, geliat industri kreatif di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan sekarang ini sebagian orang mulai memprediksikan pertumbuhan industri kreatif bisa melonjak cukup tinggi yakni hingga mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa kita lihat dari pertumbuhan industri kreatif yang semakin hari semakin aktif, sehingga penyerapan tenaga kerja serta kapasitas daya cipta di negara kita mulai merangkak naik dan memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya, banyak daerah di Indonesia yang berkembang perekonomiannya lewat sektor industri dan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata suatu daerah sangat diperhatikan bila daerah tersebut memiliki potensi objek-objek alam yang indah. Dengan pengembangan tersebut akan menambah

tenaga kerja pada daerah tersebut. Tingkat pengangguran juga berkurang. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dalam upaya pengembangan bidang ekonomi. Pemerintah harus bisa menemukan cara agar daerahnya mempunyai nilai unggul, atau yang dimaksud dengan daerah yang mempunyai nilai tinggi dalam bidang ekonomi. Jika sudah menemukan caranya, maka akan diterapkan pada daerahnya dan masyarakat juga harus memiliki kemauan dan kesadaran yang tinggi untuk memajukan daerahnya.

Adanya desentralisasi dapat membantu Pemerintah dalam upaya pengembangan bidang ekonomi. Pemindahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan mengelola daerah otonomnya ini dimaksudkan agar Pemerintah dapat lebih fokus mengatur dan mengelola daerah otonomnya sendiri yang akan berdampak pada pembangunan daerah-daerah kecil yang mempunyai potensi di berbagai sektor/bidang termasuk pada pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif ini. Tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa adanya pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan agar Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akibat adanya krisis yang berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan dari dekosentrasi menjadi desentralisasi, pilihan strategisnya adalah pada pemulihan ekonomi (*economic recovery*) yang dahulu merupakan tanggung jawab pusat menjadi tanggung jawab daerah (Sodik, 2008). Hal ini terjadi pada Kota Batu. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga

kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yang terdiri dari 19 desa serta 4 kelurahan. Kota Batu disahkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Dibalik kota yang secara administratif masih muda ini terkandung potensi yang tiada tara terutama potensi wisata dan industri kreatifnya. Kota ini memiliki sejuta potensi alam yang mungkin tidak dimiliki daerah-daerah lain. Kota Batu memiliki potensi yang besar di sektor pertanian khususnya sayur dan buah-buahan sedangkan di sektor industri yang potensial adalah industri pariwisata dan industri rumah tangga. Berdasarkan fasilitas non fisik, Kota Batu berada pada peringkat 8 (terakhir dibanding wilayah kabupaten dan kota di sekitarnya). Kelemahan dari Kota Batu itu sendiri dalam hal daya saing, antara lain: Kondisi makro ekonomi, pendapatan daerah, industrialisasi, pangan, dan kinerja aparatur. Dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas fisik, Kota Batu sendiri hanya menduduki peringkat ke-7. Sedangkan Kota Batu mempunyai kelemahan yang paling mendasar pada fasilitas kesehatan dan ekonomi (id.wikipedia.org).

Wilayah Kota Batu sendiri sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara logika semakin luasnya suatu wilayah, maka potensi sumber daya alam dan juga potensi ekonomi suatu wilayah pemerintahan akan semakin besar. Sehingga jika dilakukan suatu manajemen pemerintahan yang tepat di Kota Batu, dipastikan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kota Batu sebagai kota yang maju. Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Kota Batu ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 tercatat IPM Kota Batu sebesar 74,35% dan di tahun 2011 sebesar 74,93%. Terjadinya kenaikan presentase IPM ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Batu yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu dalam keberlangsungan hidupnya. Pemerintah Kota Batu sendiri juga telah berhasil dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat digunakan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu.

Dalam setiap usaha tentu ada persaingan sempurna, ada *free entry* dan *free exit*. Usaha yang tidak efisien dengan sendirinya akan mati dan keluar dari pasar. Jika tingkat keuntungan dari usaha itu relatif menarik, maka akan banyak pendatang baru dalam industri tersebut (Maryatmo & Susilo, 1996:57). Begitu juga yang terjadi pada pertumbuhan industri di Kota Batu. Kota ini mampu mengangkat *image* wisata secara lebih profesional dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah ini. Seperti misalnya pada sektor industri kerajinan tangan yang tersebar di berbagai penjuru Kota Batu. Dimana konsep industri kreatif sendiri merupakan aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka industri-industri kecil seperti kerajinan tangan yang ada di Kota Batu merupakan salah satunya. Seperti misalnya kerajinan yang terdapat di Kota Batu adalah kerajinan batik, kerajinan cobek, kerajinan batu onyx, kerajinan gerabah, dan kerajinan gong. Kerajinan-kerajinan ini mempunyai peranan tersendiri didalam pengembangan

perekonomian daerah. Adanya inovasi dan kreativitas yang timbul pada masyarakat inilah yang membuat sektor industri kreatif di suatu daerah mempunyai peran penting dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Terlebih lagi pada Kota Batu yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan Kota Wisata Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional.

Industri kreatif sektor kerajinan merupakan salah satu dari 14 sektor industri kreatif yang diidentifikasi sangat potensial untuk terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dikatakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, karena kelompok industri ini tercatat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan pada PAD Kota Batu. Berdasarkan data dari BPS Kota Batu mencatat bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di tahun 2012 mencapai 65%. Dari sektor industri sendiri juga mengalami kenaikan nilai produksi setiap tahunnya. Pada tahun 2011, nilai produksi di Kota Batu mencapai 16,8 juta dan pada tahun 2012 mencapai 18 juta. Sektor industri juga sanggup menyerap tenaga kerja hingga 454 orang di tahun 2011 dan 498 orang di tahun 2012 (Kota Batu dalam Angka).

Untuk pengembangan sektor industri kreatif ini Pemerintah Kota Batu menetapkan beberapa kebijakan salah satunya dengan menolak berdirinya industri besar dan menengah yang menyebabkan berdirinya pabrik kelas besar dan menengah. Adapun yang diperkenankan berdiri di Kota Batu hanyalah industri kecil dan menengah yang bersifat padat karya khususnya pada sektor industri

seperti industri kerajinan. Adanya kebijakan seperti ini merupakan salah satu cara dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan potensi yang dimiliki dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu juga berharap dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat dan PAD Kota Batu sendiri (Aven, 2011).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "**Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu)**". Mengingat dimana setiap sentra industri kreatif yang berada di Kota Batu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Wisata Batu. Pemerintah Kota Batu juga dapat mengelola dan membina agar sentra industri kreatif yang terdapat di Kota Batu dapat bersaing di pasar bebas secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Wisata Batu?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu.

D. **Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu meliputi:

1. Kontribusi Akademis

   Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang administrasi, kebijakan publik, pengembangan ekonomi sektor publik, khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir ilmiah dan logis.

2. Kontribusi Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batu untuk menyusun perencanaan pembangunan industri kreatif dalam rangka pemerataan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi

penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

E. **Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai Industri Kreatif yang ada di Kota Batu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan, Konsep Pengembangan dan Industri Kreatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data dan diakhiri dengan keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan dalam permasalahan penelitian ini.